

Penguatan Kompetensi Pengelola Melalui Pelatihan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Sukoharjo

Ahmad Dzakiyuddin^{1a,1}; Yoga Pratama Nugroho^{a,2}; Made Wedaswari^{a,3}; Shinta Nastitie Komalasari^{a,4}

^aProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

¹ ahmdzay9@gmail.com

* Corresponding author

 <https://doi.org/10.25134/jise.v4i2.146>

Article history: Received Juli 1, 2025; Revised Agustus 13, 2025; Accepted Agustus 20, 2025; Available online Agustus 20, 2025

Abstrak: Pengabdian masyarakat merupakan suatu sarana yang menjembatani dunia pendidikan dengan masyarakat. Dalam hal ini Perguruan Tinggi berperan dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai problem dan tantangan yang ada. Salah satu contohnya adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yang diharapkan dapat menjadi perusahaan desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai unit usaha di dalamnya. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan profit usaha melalui penguatan kompetensi pengelola BUMDes di Kabupaten Sukoharjo. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola BUMDes, tetapi juga secara khusus menargetkan peningkatan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Kepmendes 136/2022. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Participatory Learning and Action (PLA) meliputi ceramah, tanya jawab dan diskusi. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes dalam hal tata kelola keuangan. Sehingga harapannya pengelola BUMDes mampu menjalankan program yang tepat sasaran, menghasilkan profit atas usaha yang dijalankan serta mampu mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan post tes atas kegiatan pengabdian ini, diperoleh hasil bahwa pemahaman pengetahuan pengelola BUMDes secara rerata meningkat 62,5%. Pemahaman pengetahuan ini ditinjau dari sisi pengetahuan klasifikasi akun keuangan, penyusunan laporan arus kas dan kemampuan dalam menyusun bukti transaksi. Kami juga mengharapkan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah dan pihak terkait dengan bentuk kerja sama yang lebih erat dan terencana antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi yang ada di kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa; BUMDes; Participatory Learning Action; Tata Kelola Keuangan.

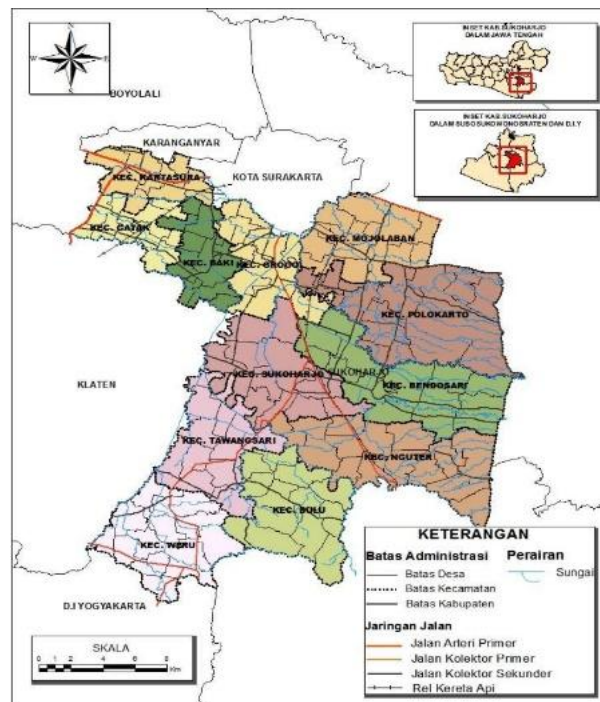
Abstracts: Pengabdian masyarakat is a means of bridging the world of education with society. In this context, higher education institutions play a role in assisting communities in facing various problems and challenges. One example is the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Sukoharjo Regency, which is expected to become a village company capable of improving the welfare of the village community through various business units within it. This community service program aims to empower the community and create business profits by enhancing the capacity of BUMDes managers in Sukoharjo Regency. This program not only focused on improving the quality of BUMDes managers, but also specifically targets improving the ability to prepare financial reports in accordance with the standards of Kepmendes 136/2022. The methods used in this activity include lectures, question and answer sessions, and discussions. The main objective of this service activity is to improve the management of BUMDes in terms of financial governance. Thus, it is hoped that BUMDes managers will be able to implement targeted programs, generate profits from their businesses and be accountable in accordance with applicable regulations. Based on post test in this agenda, the results showed that BUMDes managers understanding of the financial statement increased by an average 62,5%. The understanding was assessed in terms of financial account classification, cash flow statement preparation and the ability to prepare transaction evidence. We also hope for follow up actions from the local government and related parties in the form

of closer and more planned cooperation between higher education institutions and the local government in exploring the potential available in Sukoharjo Regency.

Keyword: Village-Owned Enterprises; BUMDes; Participatory Learning Action; Financial Management.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sukoharjo adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi kabupaten Sukoharjo sangat besar dengan mempertimbangkan geografis wilayah dengan luas 46.666 hektar atau 1,43% luas provinsi Jawa Tengah (BPS Sukoharjo, 2024: Gambar 1). Daerah ini memiliki basis ekonomi kemaritiman dan pariwisata dengan pengembangan ekonomi masyarakatnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Gambar 1: Peta Geografis Kabupaten Sukoharjo.

BUMDes merupakan sebuah entitas usaha yang didirikan oleh desa dan telah memiliki status badan hukum (Iskandar *et al.*, 2021). BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar dikelola oleh desa berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sri & Dewi, 2014). Pendirian BUMDes bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi yang ada di desa dengan memperkuat kerja sama antar unit usaha di desa serta menciptakan lapangan kerja (Iskandar *et al.*, 2021). Sumber daya manusia yang memadai diperlukan agar pengelolaan dan perkembangan BUMDes bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan (Rosari *et al.*, 2022).

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukoharjo terdapat 150 BUMDes aktif dengan masing-masing kategori dan unit usahanya. Pertumbuhan jumlah BUMDes yang ada didukung dengan potensi wilayah akan berdampak positif apabila dikelola dengan baik. Tata kelola yang baik salah satunya adalah pada hal tata kelola keuangan. Dalam hal ini secara spesifik tata kelola keuangan BUMDes terstandarisasi dalam Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEPMENDES) Nomor 136 (Republik Indonesia, 2022). Namun secara data, hanya 42% BUMDes di Kabupaten Sukoharjo yang sudah menyesuaikan menurut standar tersebut (Tabel 1). Ketidaksesuaian standar tata kelola keuangan BUMDes dengan Kepmendes 136/2022 berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi kinerja BUMDes maupun desa. BUMDes yang belum memenuhi standar tersebut rentan mengalami ketidakteraturan administrasi (Aulianisa *et al.*, 2023), kurang transparan dalam pelaporan keuangan (Akbar *et al.*, 2022), serta berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan usaha (Puspitasari, 2021). Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, terhambatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan, serta berpotensi menghambat akses BUMDes terhadap peluang pendanaan dan

kemitraan yang membutuhkan laporan keuangan yang terstandarisasi. Akibatnya, potensi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa tidak dapat dioptimalkan secara maksimal dan pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Tata kelola keuangan Bumdes dalam hal ini merupakan bentuk pendampingan bagi direktur dan pengurus dalam memaksimalkan potensi usaha dan pelaporan keuangan. Tata kelola keuangan menjadi penting bagi BUMDes (Lilik Handajani et al., 2021) di mana posisinya saat ini merupakan perusahaan desa yang memiliki tujuan penting untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha desa (Safira Iman Niar et al., 2024) yang ditopang dengan kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dukungan pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha Bumdes.

Tata kelola keuangan Bumdes merupakan fase ketiga setelah sebelumnya menyelesaikan permasalahan klasik yang ada di Bumdes berupa Kelembagaan dan pembentukan serta inovasi usaha (Safira Iman Niar et al., 2024). Harapannya dengan adanya pelatihan tata kelola keuangan ini, direktur beserta pengurus Bumdes mampu memaksimalkan potensi usaha yang ada di desanya masing-masing serta mampu menghasilkan keuntungan atas usaha tersebut. Output akhir dari aktivitas yang ada di Bumdes adalah mampu memenuhi pertanggung jawaban atas usahanya dalam bentuk pelaporan keuangan Bumdes.

Berdasarkan kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, tim pengabdian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo menyelenggarakan Pelatihan dan Pendampingan Tata Kelola Bumdes yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas direktur dan pengurus Bumdes. Diharapkan pelatihan dan pendampingan ini dapat memaksimalkan potensi usaha yang ada di desa serta memenuhi pertanggung jawaban Bumdes dalam hal pelaporan keuangan.

Tabel 1: Data BUMDes Kabupaten Sukoharjo (diolah).

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes	Status Badan Hukum		Tata Kelola Keuangan Sesuai Kepmendes 136 Tahun 2022	
			Sudah	Belum/ Proses	Sudah Sesuai	Belum Sesuai
1	Weru	22	5	17	4	18
2	Bulu	11	1	10	0	11
3	Tawang Sari	11	4	7	2	9
4	Nguter	15	11	4	7	8
5	Bendosari	13	9	4	5	8
6	Polokarto	17	11	6	8	9
7	Mojolaban	11	9	2	6	5
8	Grogol	13	13	0	10	3
9	Baki	13	12	1	9	4
10	Gatak	14	12	2	10	4
11	Kartasura	10	3	7	3	7
JUMLAH		150	90	60	64	86

2. METODE

Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan dengan metode Participatory Learning and Action (PLA) (Silmi, 2017) yang berfokus pada peningkatan kapasitas melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Metode PLA dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara fasilitator dan peserta, mendorong peserta untuk aktif menggali permasalahan nyata di lapangan, serta merancang solusi secara bersama-sama. Dibandingkan dengan metode konvensional seperti ceramah satu arah atau pelatihan berbasis modul tanpa praktik langsung, PLA lebih efektif dalam membangun keterlibatan peserta, mempercepat transfer pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan aplikatif di tingkat pengelola BUMDes. Dengan PLA, peserta tidak hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil.

Kegiatan diawali dengan observasi kebutuhan (*need assessment*) melalui koordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Sukoharjo dan pengurus BUMDes setempat. Selanjutnya dilakukan sesi pelatihan intensif dengan pendekatan ceramah interaktif, studi kasus nyata dan simulasi pelaporan keuangan sederhana berbasis excel yang mengacu pada standar Kepmendesa No.136 Tahun 2022. Kriteria pemilihan

peserta didasarkan pada rekomendasi DPMD, dengan prioritas pada pengelola inti BUMDes aktif yang bertanggung jawab langsung pada aspek keuangan dan pelaporan, serta memiliki komitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Selain tahapan pelatihan dan pendampingan, evaluasi efektivitas program dilakukan dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Pre-test diberikan sebelum pelatihan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman awal peserta terkait tata kelola keuangan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes sesuai Kepmendes No.136/2022. Setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai, peserta diberikan post-test dengan materi yang serupa guna menilai peningkatan kompetensi yang diperoleh. Di samping itu, evaluasi dilakukan juga melalui observasi keaktifan peserta dalam diskusi, penugasan praktis saat simulasi pelaporan keuangan, serta umpan balik (feedback) dari peserta terkait materi dan metode pelatihan.

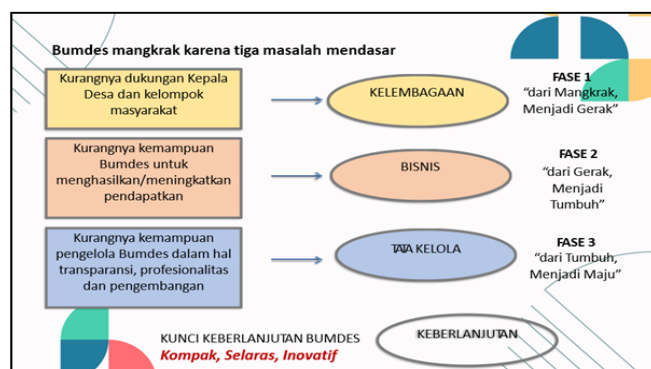
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan telah dilaksanakan di Gedung H Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan dihadiri oleh 100 peserta dari pengurus BUMDes yang ada di kabupaten Sukoharjo. Pelatihan dan pendampingan ini diawali dengan pembahasan kerangka konseptual revitalisasi BUMDes yang tidak hanya cukup pada aspek legal-formal, tetapi juga penguatan tata Kelola dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Pemetaan potensi usaha dan penyusunan pelaporan keuangan menjadi dua hal penting dalam memastikan operasional BUMDes yang sehat dan akuntabel. Tujuan utama BUMDes, tidak hanya menjadi entitas usaha desa, tapi juga memberikan manfaat nyata dan menjadi alat strategis untuk mendorong kesejahteraan bagi Masyarakat desa (Gambar 3).



Gambar 3: Revitalisasi BUMDes.

Selanjutnya fokus pembahasan pada mengenali potensi dan menggali value sektor usaha yang ada di desa. Setiap desa memiliki sumber daya yang unik, baik dari segi alam, manusia, budaya dan sosial yang dapat diidentifikasi dan dioptimalkan. Dari setiap sumber daya yang ada tersebut, tidak semuanya relevan dengan kebutuhan pasar dan bisa dikembangkan menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Diantara cara yang bisa dilakukan adalah dengan uji kelayakan potensi usaha, menelaah lebih lanjut hingga menyusun konsep yang matang dari berbagai pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan dan dampaknya bagi masyarakat desa. Kunci sukses keberlanjutan usaha di BUMDes adalah adanya sinergi antar pemangku kepentingan, selaras arah tujuan dan adaptif terhadap kebutuhan dan peluang baru (Gambar 4).

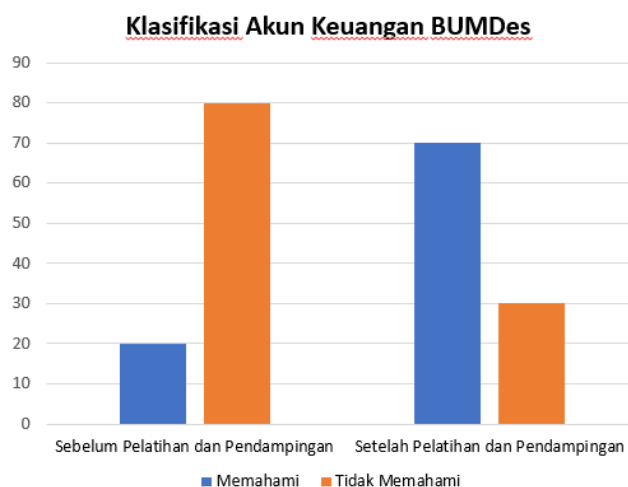


Gambar 4: Penggalian potensi dan value.

Pasca usaha berjalan di BUMDes maka langkah selanjutnya adalah memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Siklus pengelolaan keuangan terdiri dari enam tahapan utama (Gambar 5) yang saling berhubungan, berupa:

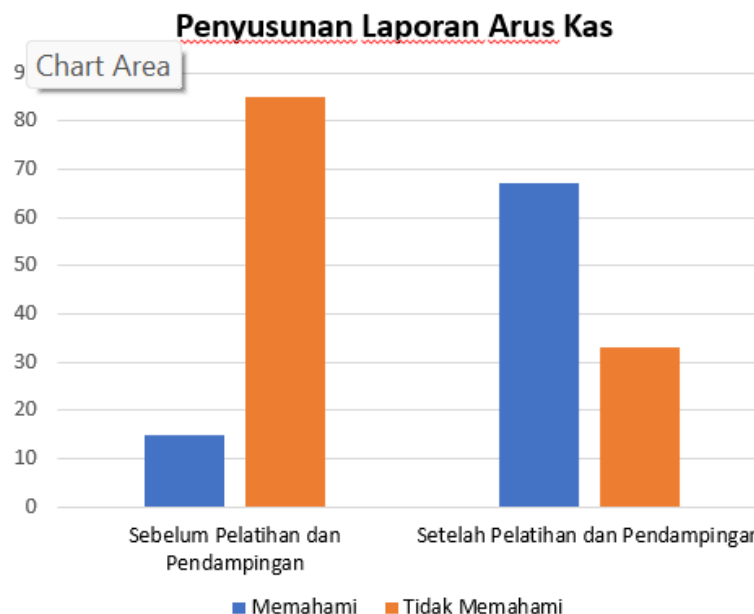
1. **Perencanaan**
Siklus pengelolaan keuangan BUMDes diawali dengan perencanaan keuangan. Hal ini berupa penyusunan rencana kerja dan usaha (RKAP BUMDes) untuk menentukan tujuan keuangan, strategi pencapaian dan kebutuhan pembiayaan. Perencanaan yang baik menjadi landasan bagi pengambilan keputusan yang akuntabel.
2. **Penganggaran**
Tahap ini berupa proses menyusun anggaran pendapatan dan belanja BUMDes berdasarkan rencana kerja yang telah disusun. Anggaran ini mencakup estimasi penerimaan, alokasi belanja operasional dan investasi serta proyeksi laba rugi. Penganggaran memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
3. **Penatausahaan**
Tahap ini berupa proses pencatatan, pengelolaan kas dan administrasi keuangan secara tertib, sistematis, sesuai dengan prinsip akuntansi dan sesuai dengan standar Kepmendesa No.136 tahun 2022. Tujuannya adalah agar setiap transaksi keuangan dapat terdokumentasi dengan baik sebagai dasar untuk pelaporan keuangan dan audit internal BUMDes.
4. **Pelaporan**
Tahap ini merupakan penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban secara berkala (bulanan, semester dan tahunan). Pelaporan harus menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja BUMDes secara jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di forum tertinggi yang ada di desa yaitu Musyawarah Desa (Musdes).
5. **Pertanggungjawaban**
Tahapan ini menekankan pada proses penyampaian laporan dan hasil usaha kepada pemangku kepentingan di forum Musdes. Pertanggungjawaban dalam hal ini tidak hanya administratif saja, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial dan akuntabilitas publik.
6. **Evaluasi**
Proses peninjauan ulang atas pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan BUMDes. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana, mengetahui kekurangan dan rekomendasi perbaikan untuk siklus keuangan di periode berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pengetahuan peserta sebesar rata-rata 62,5% berdasarkan post test yang dilakukan. Peserta mengaku lebih memahami klasifikasi akun keuangan BUMDes (Gambar 7), penyusunan laporan arus kas (Gambar 8) serta teknik dokumentasi bukti transfer (Gambar 9).



Gambar 7: Evaluasi Klasifikasi Keuangan BUMDes

Pada bagian klasifikasi akun keuangan BUMDes, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan peserta yang semula 20% menjadi 70%. Pada aspek penyusunan laporan arus kas juga peserta mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan dari 15% menjadi 68%. Sementara itu, pada sisi Teknik dokumentasi bukti transfer, dalam hal ini pengetahuan dan kemampuan peserta juga mengalami peningkatan yang semula 40% menjadi 78%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan berhasil dalam meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta.



Gambar 8: Evaluasi Penyusunan Laporan Arus Kas.

Kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya kesadaran peserta terhadap pentingnya pelaporan yang akuntabel, ditunjukkan dari adanya inisiatif 25% peserta Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pasca pelatihan dan pendampingan. Isi RTL yang disusun peserta meliputi komitmen penerapan standar pelaporan keuangan BUMDes sesuai Kepmendesa No.136 tahun 2022, penjadwalan penyusunan, penyerahan laporan keuangan secara berkala, serta penguatan koordinasi internal dalam tim pengelola BUMDes untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa peserta juga memasukkan agenda pelatihan internal bagi pengurus lain di desanya serta rencana pemanfaatan teknologi sederhana, seperti penggunaan aplikasi spreadsheet, untuk memudahkan proses pelaporan.

Dari sisi implementasi, peserta yang menyusun RTL berkomitmen untuk mulai mengadopsi format laporan keuangan standar pada periode pelaporan berikutnya, melakukan evaluasi rutin setiap triwulan, serta menjalin komunikasi intensif dengan DPMD sebagai bentuk monitoring dan konsultasi teknis. Secara kelembagaan, kegiatan ini membantu DPMD Kabupaten Sukoharjo dalam mendorong percepatan adopsi standar pelaporan keuangan berbasis Kepmendesa No.136/2022 pada BUMDes di wilayahnya.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Pertama, keterbatasan waktu untuk melakukan tindak lanjut dan pendampingan secara intensif, sehingga monitoring hasil implementasi RTL secara menyeluruh belum dapat dilakukan. Kedua, cakupan wilayah kegiatan terbatas pada BUMDes di Kabupaten Sukoharjo, sehingga temuan dan dampak kegiatan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah kabupaten. Ketiga, variasi kapasitas awal peserta menyebabkan laju pemahaman dan adopsi standar pelaporan keuangan berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan pendampingan yang lebih beragam di masa mendatang. Keterbatasan-keterbatasan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan desain dan rencana program pengabdian masyarakat di periode selanjutnya.



Gambar 9: Suasana Pemaparan Materi Tata Kelola Keuangan BUMDes.



Gambar 10: Peserta Antusias Menyimak Pemaparan Materi.



Gambar 11: Beberapa peserta Menyusun RTL Agenda Pengabdian.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan pendampingan tata kelola keuangan BUMDes yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan intensif memberikan dampak signifikan terhadap kompetensi individu pengelola serta akuntabilitas kelembagaan BUMDes. Hasil kegiatan ini menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis praktik (*practice-based learning*) terbukti efektif dalam membangun pemahaman dan keterampilan akuntansi di kalangan pengelola BUMDes, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi secara nyata dalam mempercepat adopsi dan implementasi standar tata kelola keuangan BUMDes yang selaras dengan regulasi pemerintah. Dampak yang dihasilkan dari program ini tidak hanya dirasakan pada level individu – melalui peningkatan kapasitas dan literasi keuangan pengelola – namun juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Secara sosial, kegiatan ini memperkuat kapasitas SDM pengelola BUMDes. Secara ekonomi, optimalisasi pelaporan keuangan mendorong transparansi dan akuntabilitas, sedangkan secara kelembagaan, terbangunnya tata kelola yang lebih baik berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap BUMDes.

Berdasarkan temuan dan capaian yang diperoleh, model pelatihan dan pendampingan berbasis praktik yang melibatkan sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah ini dinilai efektif dan relevan untuk direplikasi di wilayah lain. Upaya kolaboratif semacam ini diharapkan dapat memperluas dampak positif penguatan tata kelola keuangan BUMDes secara nasional, sekaligus mempercepat transformasi kelembagaan menuju BUMDes yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, keberhasilan program ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan model pelatihan BUMDes di masa mendatang, serta mendorong perlunya kebijakan yang mendukung kolaborasi multipihak guna mempercepat penguatan kapasitas tata kelola keuangan BUMDes secara berkelanjutan. Untuk memaksimalkan dampak dan kesinambungan program, disarankan agar pemerintah daerah menyusun kebijakan pendampingan berkelanjutan bagi pengelola BUMDes, setidaknya selama minimal enam bulan pasca pelatihan. Kebijakan ini dapat berupa pembentukan tim pendamping khusus di tingkat kabupaten, penyediaan platform konsultasi daring, serta monitoring berkala terhadap implementasi standar tata kelola keuangan. Selain itu, perlu adanya integrasi model pelatihan berbasis praktik ke dalam program pembinaan BUMDes secara rutin, guna memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan berjalan optimal. Implikasi bagi pemerintah daerah adalah perlunya memperkuat komitmen, alokasi sumber daya, dan kolaborasi multipihak agar proses transformasi kelembagaan BUMDes dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan program ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan model pelatihan BUMDes di masa mendatang, serta mendorong perlunya kebijakan daerah yang mendukung kolaborasi multipihak dan pendampingan berkelanjutan guna mempercepat penguatan kapasitas tata kelola keuangan BUMDes secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M., Sasanti, E. E., & Suryantara, A. B. (2022). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bumdes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(4), 716–725. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310>
- Aulianisa, S., Yuningsih, N. Y., & Afrilia, U. A. (2023). Silmy Aulianisa. 222 *Janitra*, 3(2), 222–229.
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 296–303. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i4.1127>
- Puspitasari, M. A. (2021). Identifikasi Risiko dalam Pengelolaan Keuangan di BUMDES Maskumambang Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 245–255. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i1.1802>
- Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes*. 1–168. <https://kanaldesa.com/peraturan/kepmendes-1362022>
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner*, 6(3), 2921–2930. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.870>
- Safira Iman Niar, U., Wahyu Oktavendi, T., & Irawan, D. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Bumdes Berdasarkan Prinsip Corporate Governance Di Kabupaten Magetan. *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(3), 1081–1091. <https://doi.org/10.32534/jv.v18i3.5122>
- Silmi, A. F. (2017). Participatory Learning And Action (Pla) Di Desa Terpencil: Peran LSM PROVISI

Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo, Sumatra Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 97.

<https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-05>

Sri, A., & Dewi, K. (2014). *Se b agai up aya dal am m e ningkat kan p e ndap at an asl i de sa (p ad es) se rt a menumbuhkan perekonomian desa*. V(1), 1-14.